

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada zaman ini mengalami kemajuan yang semakin pesat dan memiliki prospek yang bagus dalam hal apapun, namun dengan adanya perkembangan itu kebutuhan masyarakat semakin hari juga akan semakin bertambah, dengan adanya perkembangan dan perubahan itu masyarakat berupaya dalam kegiatan perekonomian tersebut dengan mendirikan suatu perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, dagang maupun industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya dalam perkembangan perekonomian pada era globalisasi. Dari berbagai perusahaan itulah sektor terkait di label hiburan, perhotelan, jasa parkir, penerangan, restoran, dan lain-lain. Pada zaman saat ini, hal tersebut tidak terlepas sebagai objek pajak karena pajak daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajakk yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya daerahnya guna mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar melalui pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara terpisah, untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintah daerah secara optimal. Kegiatan jangka pendek yang mudah dan dapat segera dilakukan adalah

melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan kas negara yang melemah berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Salah satu penyebab kas negara melemah yaitu kurang profesionalnya SDM yang menanganinya dan kejujuran dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran negara. Tanpa kas negara bisa dikatakan negara tidak bisa melakukan pembangunan nasional, pembangunan nasional harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus tanpa henti. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan (Kas) negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam mengusahakan pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaa pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian didaerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya peningkatan penyediaan pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah,

dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemungutan, penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari pajak daerah, seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 s/d 2022 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan target yang harus dicapai setiap tahunnya, bahkan dalam 5 tahun terakhir target yang ditetapkan berhasil dilampaui (over target).

Contoh penerimaan daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal ini yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir semua orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi dengan jumlah peningkatan kendaraan di daerah Indonesia khususnya di perkotaan dari tahun ke tahun terus meningkat. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis parkir ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat antara pengelola parkir.

Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai mana diketahui bahwa pajak parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir saat ini sangatlah diperlukan untuk keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Berdasarkan keterangan diatas, maka saya sebagai penulis dan penyusun laporan magang akan menjelaskan tentang **`PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PARKIR DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI`**.

1.2. Masalah Pokok Laporan

berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi masalah pokok laporan adalah: Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dearah Kota Jambi?

1.3. Tujuan dan Manfaat penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah: untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Darah Kota Jambi.

1.3.2. Manfaat penulisan

Melalui penulisan ini diharapkan menghasilkan suatu yang bermanfaat baik bagi penulis, bagi Masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan penulisan tersebut. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Guna memenuhi syarat kelulusan Program Studi Perpajakan Diploma III di Universitas Jambi.
- b. Bagi instansi Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang prosedur pembayaran pajak parkir.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan prosedur pembayaran pajak parkir sebagai Upaya peningkatan asli daerah.

3. Bagi Almamater

Bagi Almamater, penulisan ini dapat menjadi salah satu tambahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang memerlukan sumber data dalam melakukan penulisan berikutnya tentang bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.4. Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara dan berbagai sumber guna mencapai hasil yang maksimal:

1.4.1. Jenis Data

Data yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer adalah data yang diperoleh langsung baik secara dokumen maupun wawancara dengan pegawai atau staff yang berada dalam ruang lingkup instansi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam permasalahan Prosedur Pembayaran Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari data yang telah disediakan atau yang sudah diolah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Data sekunder diperoleh melalui buku, internet, dan literatur yang ada kaitannya dengan ruang lingkup penulisan seperti situs website, buku-buku, dokumen dan undang-undang yang berlaku dan berhubungan dengan materi penulisan.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Data metode ini penulis melakukan secara langsung pengumpulan data dari tatap muka dan tanya jawab, dan seiring dengan perkembangan teknologi metode wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu

2. Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis mengumpulkan kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku-buku, peraturan perpajakan ataupun keterangan dan informasi yang berkaitan dengan judul laporan yang dibahas.

1.4.3. Metode Analisis Data

Dalam laporan ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan dengan metode analisis deskriptif yang mana data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi untuk di analisis menjadi kejelasan mengenai masalah yang diamati.

1.5. Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan praktek kerja lapangan/magang pada bidang pembukuan dan pelaporan di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Yang beralamat di Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129. Adapun jadwal magang dilakukan kurang lebih dua bulan, yaitu dimulai pada 08 Februari-10 April 2023.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam laporan ini, penulis menguraikan bab demi bab dalam uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentangb latar belakang, pokok masalah laporan, tujuan dan manfaat laporan, metode penulisan, waktu dan tempat magang serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penjelasan-penjelasan yang menjadi landasan dalam laporan ini.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum instansi magang, Prosedur Pembayaran Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini merupakan penutup dari laporan ini yang berisikan simpulan dan saran yang nantinya diharapkan lebih berguna bagi pembaca pada umumnya.

